

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah aplikasi dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi. Aplikasi SAKTI digunakan untuk menggantikan Aplikasi Eksisting yang saat ini digunakan oleh Satker yaitu Aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan per 30 Juni 2025. Entitas berkedudukan di Jalan Laks. R.E. Martadinata Tanjungpandan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Perikanan Terpadu.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN. Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegritaskan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SAKTER dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan

sub modul Manajemen Komitmen). Modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

3. Proses Pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Portal SPAN

A.3. Portal SPAN

Portal SPAN merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama Satker tidak perlu secara langsung datang ke KPPN untuk menyamaikan ADK, namun cukup masuk ke Portal SPAN dan mengakses menu yang ada untuk melakukan pengiriman ADK ke SPAN. Sebaliknya, penerimaan data dari SPAN juga akan dilakukan melalui Portal SPAN, sehingga Satker tidak perlu lagi datang ke KPPN. Portal SPAN juga digunakan untuk melakukan validasi atas ADK yang dikirimkan oleh Satker. Validasi merupakan tanda bukti bahwa ADK berasal dari satker yang benar dan telah diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang.

SMS SPAN

A.4. SMS SPAN

SMS SPAN merupakan sarana yang disediakan untuk satker dalam memonitor status pengiriman ADK. Data ADK dan SPAN dan mengetahui status data keuangan lainnya. Satker cukup mengirimkan SMS dengan format yang ditentukan SPAN – SMS *service*. Sistim SPAN akan mengirimkan informasi yang diperlukan secara otomatis. Pengecekan keabsahan SMS tersebut akan dilakukan oleh sistim melalui *Personal Identification Number* (PIN) yang identik, khusus dan hanya diketahui oleh pejabat satker yang berwenang. Dengan demikian pejabat tersebut bertanggungjawab penuh atas penggunaan PIN dalam komunikasi data SMS SPAN yang otomatis menjamin keabsahan suatu SMS yang dikirimkan ke portal SPAN.

Keamanan data sakti

A.5. Keamanan Data Sakti

Keamanan data sebagai hasil dari SAKTI menjadi salah satu perhatian yang sangat krusial dan sudah dipikirkan dalam penerapan SPAN semua data yang di pertukarkan dalam interkoneksi SAKTI dan SPAN harus memenuhi syarat keamanan yang ketat sebagai berikut :

1. Pembatasan akses ke portal SPAN

Hanya pihak-pihak yang terdaftar sebagai user saja yang bisa mengakses/menggunakan portal SPAN.

2. Kerahasiaan Data

ADK SAKTI akan menggunakan pengamanan berupa *hash code* untuk masing-masing data sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan tidak akan berubah selama proses perpindahan data.

3. Keaslian data

Setiap ADK akan dijamin keasliannya menggunakan PIN. Penggunaan PIN memastikan bahwa ADK telah diketahui, disetujui dan diotorisasi oleh pejabat satker yang berwenang.

Berbagai Modul yang ada di SAKTI :

1. Modul Penganggaran
2. Modul Komitmen
3. Modul Pembayaran
4. Modul Bendahara
5. Modul Persediaan
6. Modul Aset Tetap
7. Modul Pelaporan
8. Modul Administrastrator.

Pendapatan- LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).

- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 2) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- 3) Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- 4) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

9. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- 1) Tanah;
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp721.936.409*

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp721.936.409 atau mencapai 39,03% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.849.720.000. Penurunan penerimaan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran 2025 di Indonesia didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan daerah. Inpres ini menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Semester I T.A. 2025 terdiri dari:

MAP 425131 yaitu Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan didapat dari Sewa rumah dinas yang dipotong dari gaji pegawai melalui SPM Gaji Sebesar Rp5.746.909.

MAP 425151 yaitu Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi yaitu Jasa Kendaraan, Jasa Tangki BBM dan Instalasinya, Jasa Alat (Jasa Forklif, Jasa Dumptruk, Jasa Kendaraan Tangki Air, Jasa Dok, Jasa Bengkel, Tanah (Biaya Pengembangan, Pemeliharaan Prasarana, Bangunan Pelabuhan Perikanan) serta Tanah yang dipakai untuk (Jasa Lapangan Penjemuran Jaring dan Tempat Penumpukan Barang) serta Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana. Sebesar Rp118.613.336.

MAP 425621 yaitu Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan Terdiri dari Jasa Tambat Labuh, Jasa Pas Masuk, Jasa Pengadaan Es, Jasa Pengadaan air (Air eceran, Air Mobil Tangki, Air Langganan) dan Jasa Kebersihan Pelabuhan (Jasa

Kebersihan Kawasan dan Jasa Kebersihan Kolam Pelabuhan) sebesar Rp597.575.882.

MAP 425911 yaitu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp282.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d. Per 30 Juni 2025 &
2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	
-Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.746.909	7.805.028	-26,37
-Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	118.613.336	285.905.096	-58,51
-Pendapatan Jasa Pelab.Perikanan	597.575.882	559.640.133	6,78
Pendapatan Jasa Lainnya		-	
Pendapatan Anggaran Lain-Lain		-	0,00
Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TA	282	281	0,36
JUMLAH	721.936.409	853.350.538	-15,40

*Realisasi Belanja
Negara
Rp 4.410.238.173*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp4.410.238.173 atau 43,85% dari anggaran belanja sebesar Rp10.058.352.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI	4.472.899.000	3.356.501.665	75,04
BELANJA BARANG	4.622.896.000	962.550.008	20,82
BELANJA MODAL	962.557.000	91.186.500	9,47
TOTAL BELANJA KOTOR	10.058.352.000	4.410.238.173	43,85
PENGEMBALIAN BELANJA	-	-	-
JUMLAH	10.058.352.000	4.410.238.173	43,85

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.356.501.665	3.029.658.360	10,79
Belanja Barang	962.550.008	1.876.660.185	(48,71)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	91.186.500	838.849.000	(89,13)
Jumlah	4.410.238.173	5.745.167.545	(23,24)

Belanja Pegawai
Rp3.356.501.665

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.356.501.665 atau sebesar 75,04% dan Rp3.029.658.360 atau sebesar 67,12%. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,79% persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penerimaan CPNS baru tahun 2025 dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.141.432.953	1.016.779.227	12,26
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	681.459.754	619.898.704	9,93
Belanja Lembur	2.334.000	41.084.000	(94,32)
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PNS	945.396.268	833.172.408	13,47
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PPPK	586.248.953	519.444.404	12,86
Jumlah Belanja Kotor	3.356.871.928	3.030.378.743	10,77
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS		-	-
Pengembalian Belanja pembulatan Gaji PNS	136	279	-
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS		720.000	-
pengambalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		-	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	370.100	-	-
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27	104	-
Jumlah Belanja	3.356.501.665	3.029.658.360	10,79

*Belanja Barang dan
Jasa Rp962.550.008*

B.4. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp962.550.008 dan Rp1.876.660.185. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp914.110.177) atau sebesar (48,70%) dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

- Adanya Automatic Adjustment yaitu Pemblokiran sebagian anggaran di beberapa akun.

Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	247.420.342	605.581.917	(59,14)
Belanja pengiriman surat dinas pusat	-	506.000	(100,00)
Belanja Honor operasional Satker	41.650.000	43.724.000	(4,74)
Belanja Barang Operasional Lainnya	19.401.300	4.924.825	293,95
Belanja Bahan	11.941.175	46.491.097	(74,32)
Belanja Honor output kegiatan	-	9.350.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.373.604	6.883.500	21,65
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51.231.800	30.074.500	70,35
Belanja langganan Listrik	126.023.669	164.016.192	(23,16)
Belanja langganan Telpn	19.644.552	17.080.689	15,01
Belanja langganan Daya dan Jasa lainnya	3.326.280	3.669.430	(9,35)
Belanja Jasa Konsultan	-	60.000.000	(100,00)
Belanja sewa	-	200.000	(100,00)
Belanja Jasa profesi	-	2.200.000	(100,00)
Belanja jasa lainnya	285.240.000	24.176.631	1.079,82
Belanja Pemeliharaan	135.345.960	510.854.110	(73,51)
Belanja Perjalanan Dinas	12.951.326	346.927.294	(96,27)
Jumlah Belanja	962.550.008	1.876.660.185	(48,71)

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 bernilai sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 yaitu 0%. Tidak ada Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal Tanah
Rp0,-*

B.6. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dikarenakan tidak adanya anggaran yang diperuntukkan belanja modal tanah tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp91.186.500*

B.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp91.186.500 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp267.800.000. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, selain itu terdapat juga Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang

mengatur tentang efisiensi belanja K/L dalam pelaksanaan APBN 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	91.186.500	267.800.000	-65,95
Jumlah Belanja Kotor	91.186.500	267.800.000	-65,95
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	91.186.500	267.800.000	-65,95

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp571.049.000. Pada tahun 2025 Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak ada realisasi sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,89%.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan			
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	571.049.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	571.049.000	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	0	
Jumlah Belanja	0	571.049.000	-100,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0

B.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dikarenakan adanya efisiensi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2025	T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.10. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0,- karena tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya di TA 2025 dan TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp51.000.000*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah Rp51.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran		
-Uang Tunai di Brankas	51.000.000	-
-Uang di Rekening Bank	-	-
-Kwitansi UP	-	-
-Selisih Kas	-	-
Jumlah	51.000.000	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0.-*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo

rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak diperbolehkan ada karena Peraturan Bendahara harus menyetorkan langsung pendapatan pada hari itu juga.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2025	TH 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2025 dan TA.2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 30 Juni 2025 dan TA.2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.040.135 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	-	1.040.135
	-	-
Jumlah	-	1.040.135

*Piutang Bukan
Pajak
Rp1.446.588*

C.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB Per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.446.588 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang Lainnya	1.446.588	-
	1.446.588	-
Jumlah	1.446.588	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1			
2			
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0*

C.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.9. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka Per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2025	TH 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp 20.305.900

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per Per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp20.305.900 dan Rp4.710.000 mengalami kenaikan sebesar Rp15.595.900 atau sebesar 331,12%.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2025	TH 2024
Persediaan :		
- Barang Konsumsi	20.305.900	4.710.000
- Suku Cadang	-	
Jumlah	20.305.900	4.710.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi berupa pembelian Pencetakan Blangko dan Karcis Pas Masuk berada dalam kondisi baik sesuai Berita Acara Stock Opname nomor : B.1165/PPNTP/PL.450/VII/2025 tanggal 30 Juni 2025.

Tagihan TP/TGR Rp0

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2023
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

TPA Rp 0

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah Rp
112.842.552.000

C.14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp112.842.552.000. dan Rp112.842.552.000. Tidak mengalami kenaikan dan penurunan harga pada tahun 2025. Pada Tahun 2025 dengan rincian Revaluasi Aset Tetap pada Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II sebesar Rp(23.199.000), Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp(131.035.000) dan Tanah untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp(437.128.000). Tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan berupa tanah yang diperuntukkan Rumah Dinas Kepala Pelabuhan, tanah untuk Rumah Mess Karyawan, tanah untuk Bangunan Kantor, tanah untuk Tempat Kerja Lainnya dan tanah untuk Bangunan air bersih. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	112.842.552.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	112.842.552.000

Rincian saldo Tanah Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	856 M2	Jl. Laks. R.E.Martadinata	1,113,281,000
2	1.120 M2	Jl. Laks. R.E.Martadinata	1,635,000,000
3	49.858 M2	Jl. Laks. R.E. Martadinata	104,331,604,000
4	2.500M2	Jl. Gunung Sadai	838,190,000
5	3.208M2	Jl. Gunung Sadai	533,539,000
6	3.600M2	Jl.Laks. R.E. Martadinata	4,390,938,000
Jumlah			112,842,552,000

Peralatan dan Mesin
Rp 13.431.239.728

C.15. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp13.431.239.728 dan Rp13.340.053.228. Mengalami kenaikan sebesar Rp91.186.500 atau sebesar 0,68%. Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Meubelair menggunakan e-katalog :

- Meja Kerja (120 x 60 x 75) sebanyak 6 pcs dengan harga satuan sebesar Rp4.051.500. Total belanja sebesar Rp24.309.000
- Meja Kerja (150 x 60 x 75) sebanyak 5 pcs dengan harga satuan sebesar Rp4.717.500. Total belanja sebesar Rp23.587.500
- Kursi Kerja Novus TS04501 sebanyak 4 pcs dengan harga satuan sebesar Rp2.886.000. Total belanja sebesar Rp11.544.000
- Kursi Kantor Novus sebanyak 13 pcs dengan harga satuan sebesar Rp2.442.000. Total belanja sebesar Rp31.746.000

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	13.340.053.228
Mutasi bertambah	91.186.500
Hibah Barang	0
Transfer Masuk :	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2025	13.431.239.728
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	13.431.239.728

*Gedung dan
Bangunan
Rp 25.122.165.772*

C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp 25.122.165.772 dan Rp 25.122.165.772. Tidak ada kenaikan atau penurunan pada semester I tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	25.122.165.772
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	25.122.165.772
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	25.122.165.772

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp22.609.199.648*

C.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jembatan Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.609.199.648 dan Rp22.609.199.648 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	22.609.199.648
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Juni 2025	22.609.199.648
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	
Nilai Buku per 30 Juni 2025	22.609.199.648

*Aset Tetap Lainnya
Rp31.100.000*

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp31.100.000 dan

Rp31.100.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk tahun 2025.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp137.700.050 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan TPI Permanen yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(28.817.897.777)

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(28.817.897.777) dan Rp(28.817.897.777). Tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	112.842.552.000		112.842.552.000
Peralatan dan Mesin	13.431.239.728	11.111.255.045	2.319.984.683
Gedung dan Bangunan	25.122.165.772	7.579.889.126	17.542.276.646
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.609.199.648	10.126.753.606	12.482.446.042
Aset Tetap Lainnya	31.100.000	0	31.100.000
Akumulasi Penyusutan	-28.817.897.777	28.817.897.777	0
Jumlah Aset Tetap	145.218.359.371	28.817.897.777	145.218.359.371

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.21. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp15.365.000. Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi SIMDOK, aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	15.365.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang: Penghapusan Aplikasi SIMDOK	(15.365.000)
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Aset Lain-lain
Rp368.358.502

C.22. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan. (Aset lain-lain)

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp368.358.502 dan Rp368.358.502. Aset lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas berupa Mesin Skrup, Printer, Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 kva, Lampu Suar, Bangunan Bengkel atau Hanggar Permanen, PC Unit, Station Wagon, Bangunan Kolam atau Bak Ikan, Focusing Screen atau LCD Projector, Jaringan Pembawa kapasitas kecil, Jalan Provinsi Lokal, Bangunan Gedung Permanen, Bangunan Irigasi Teknis, Perkakas Kantor Lainnya, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Stationery Compresor, Kardex Besi, AC Spluit, Pesawat Telepon, Mesin Penghisap Debu, Saluran Sekunder, Saluran Tersier Pembuang, Stationary Generating Set, Pompa Tangan. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	368.358.502
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
per 30 Juni 2025	368.358.502
Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2025	
Nilai Buku per 30 Juni 2025	368.358.502

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(242.792.686)*

C.23. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(242.792.686) dan Rp(242.792.686). Tidak ada mengalami kenaikan ataupun penurunan di Semester I Tahun 2025 ini. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
- Software	-	-	-
Aset Lain-Lain	368.358.502	-	368.358.502
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	- 242.792.686	-	- 242.792.686
Jumlah	125.565.816	-	125.565.816

*Uang Muka dari
KPPN
Rp51.000.000*

C.24. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp51.000.000 dan Rp0 merupakan Uang Persediaan (UP)

atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp286.872.655*

C.25. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp286.872.655 dan Rp26.121.522. Mengalami kenaikan sebesar Rp260.751.133 atau sebesar 998,22%. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rinciannya Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus dibayar	205.332.655
2	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar	81.540.000
TOTAL		286.872.655

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp0*

C.26. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp21.635.522. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima Dimuka tersebut bersumber dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban Yang Masih
Harus Dibayar Rp.0*

C.27. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp26.121.522 merupakan kewajiban

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024
1	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	26.121.522
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	
JUMLAH		-	26.121.522

Ekuitas
Rp145.463.246.562

C.28. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp145.463.246.562 dan Rp145.595.173.320. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp743.978.102

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp743.978.102 dan Rp780.709.255 mengalami penurunan sebesar Rp(171.771.400) atau sebesar 22,00%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	(TURUN) %
-Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	(50.490)	(100)
-Pend.sewa tanah,gedung dan bangunan	5.746.909	6.690.024	(14)
-Pend.Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	141.695.446	279.604.975	(49,32)
-Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	596.535.747	494.413.975	20,66
-Pendapatan Anggaran Lain-lain		-	
-Penerimaan kembali Bel.pegawai TAYL	282	281	0,36
Jumlah	743.978.384	780.658.765	(4,70)

Pendapatan Sewa gedung dan bangunan MAP 425131 merupakan pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Pegawai yang dipotong langsung melalui SPM Gaji Pegawai.

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi MAP 425151 merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa Kendaraan, Jasa Tangki BBM, Jasa Dok, Jasa Bengkel, Jasa Tanah (Biaya Pengembangan, Pemeliharaan Prasarana dan Bangunan Pelabuhan Perikanan) serta Tanah yang dipakai untuk (Jasa Lapangan Penjemuran Jaring dan Tempat Penumpukan Barang).

Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana MAP 425621 yaitu Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari Jasa Tambat Labuh, Jasa Pas Masuk, Jasa Pengadaan Es dan Jasa Kebersihan Pelabuhan.

Pendapatan Jasa lainnya MAP.425699 yaitu Jasa Pemakaian Listrik dan Anggaran Lain-lain MAP 425999.

Beban Pegawai
Rp3.561.834.320

D.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.561.834.320 dan Rp3.225.001.093. Mengalami kenaikan sebesar Rp336.833.227 atau sebesar 10,44%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, PPPK, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.222.907.932	1.967.994.679	12,95
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.336.592.388	1.216.115.932	0,00
Beban Lembur PNS	1.130.000	21.687.000	-94,79
Beban Lembur PPPK	1.204.000	19.397.000	0,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-136	-279	-51,25
Pengembalian Belanja Tunj.Umum PNS	-370.100	-720.000	0,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-27	104,00	0,00
Jumlah	3.561.464.057	3.224.474.228	10,45

Beban Persediaan
Rp30.890.900

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.890.900 dan Rp16.168.886. Mengalami kenaikan sebesar Rp14.722.014 atau sebesar 91,05%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, pencetakan blangko dan persediaan Pita cukai, meterai dan leges termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	30.890.900	16.168.886	91,05
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			-
Beban Persediaan Suku Cadang			-
Beban Persediaan pita cukai, materai dan			
Beban barang			
Beban Persediaan Bahan Baku			
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	30.890.900	16.168.886	91,05

**Beban Barang dan
Jasa
Rp818.439.400**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp818.439.400 dan Rp1.043.962.434. Mengalami penurunan sebesar Rp(225.523.034) atau sebesar (21,60%). Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024
Beban Keperluan Perkantoran	281.420.342	693.281.917
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		506.000
Beban honor Operasional Satuan Kerja	41.650.000	43.724.000
Beban Barang Operasional lainnya	19.401.300	4.924.825
Beban Bahan	11.941.175	46.491.097
Beban honor Output Kegiatan		9.350.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.373.604	6.883.500
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-
Beban Langganan Listrik	101.008.484	134.273.162
Beban Langganan Telepon	18.538.215	14.281.872
Beban Langganan Daya dan jasa lainnya	3.326.280	3.669.430
Beban Jasa Konsultan		60.000.000
Beban Jasa Sewa		200.000
Beban Jasa Profesi		2.200.000
Beban Jasa Lainnya	332.780.000	24.176.631
Jumlah	818.439.400	1.043.962.434

**Beban
Pemeliharaan
Rp140.090.960**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp140.090.960 dan Rp559.374.560 mengalami penurunan sebesar (Rp419.283.600) atau (74,96%). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.928.270	326.355.155	-402,64
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.417.690	169.507.698	-140,72
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			0,00
Beban Pemeliharaan Irigasi			0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan		14.991.257	100,00
Beban Ekstrakomtabel gedung dan bangunan		48.520.450	100,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	4.745.000		0,00
Jumlah	140.090.960	559.374.560	-299,29

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp12.951.326**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.951.326 dan Rp346.927.294. Mengalami penurunan sebesar Rp(333.975.968) atau sebesar (96,27%). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa		223.620.343	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		12.165.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota			0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.951.326	111.141.951	-88,35
Jumlah	12.951.326	346.927.294	-96,27

**Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2023. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2021	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

**Beban Bantuan
Sosial Rp0**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2021	% NAIK (TURUN)
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

**Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp0**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, dan jembatan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	#DIV/0!

**Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		0	0,00
		-	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Lain-lain Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp282

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp282 dan Rp281 sehingga Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp282 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	282	281	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	282	281	0

Pos Luar Biasa Rp(0)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah	0	-	-

Ekuitas Awal
Rp145.595.173.320

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp145.595.173.320 dan Rp146.623.045.750 mengalami penurunan sebesar Rp(1.027.872.430) atau sebesar (0,70%).

Defisit LO
Rp(3.820.228.522)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(3.820.228.522) dan Rp (4.407.885.008) mengalami penurunan sebesar Rp(587.656.486) atau sebesar (13,33%). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada tanggal Per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0 ,- Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.467.268. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian uang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,- .

**Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi Rp0**

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(8.086.930). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena penilaian ulang aset.

Koreksi lain-lan Rp0

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi lainnya, Ekuitas Transaksi Lainnya, Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu, SAL Selisih Kurs Belum terealisasi dan Penyesuaian SAL BLU atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi Lain-lain untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

**Transaksi Antar
Entitas
Rp3.688.301.764**

E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.688.301.764 dan Rp5.072.933.290 mengalami penurunan sebesar Rp(1.384.631.526) atau (27,29%). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA.2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	721.936.409
Ditagihkan ke Entitas Lain	- 4.410.238.173
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	- 3.688.301.764

Penurunan Ekuitas
Rp(131.926.758)

E.10.Penurunan Ekuitas

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp131.926.758 dan Rp660.428.620 mengalami penurunan sebesar Rp(528.501.862) atau (80,02%).

Ekuitas Akhir
Rp145.463.246.562

E.11. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp145.463.246.562 dan Rp147.283.474.370 mengalami penurunan sebesar Rp(1.820.227.808) atau (1,24%).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

- Kenaikan atau penurunan nilai PNBPN pada Semester I 2024 dan Semester I 2025 dikarenakan adanya pembayaran sewa lahan dan bangunan yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama fluktuasi harga, volume produksi, kebijakan pemerintah, dan efisiensi pengelolaan.
- Rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran 2025 di Indonesia didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan daerah. Inpres ini menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
- Rincian PYMHD yang merupakan PNBPN tambat labuh adalah sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Total Tambat	Total Kebersihan Kolam	Nilai PYMHD
1	KM. DEKA JAYA 3	105.435	6.600	112.035
2	KM. SEMESTA JAYA 5	60.200	2.800	63.000
3	KM. RIZKI YENI	412.500	19.500	432.000
4	KM. MAJU TJ	403.100	30.000	433.100
JUMLAH				1.040.135

Sudah melakukan pembayaran PYMHD pada Januari 2025